

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Strategi Program Jabar Migrant Service Center Dalam Meningkatkan Tenaga Kerja di Jawa Barat

Cahya Sutra Kamila^a, Shafiq Juanita Ramdan^b, Adinda Dura Nafisa^c,
dan Fandi Ahmad^d

^{a,b,c,d} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^acahyasutra87@gmail.com, ^b22110259@poltek.stialanbandung.ac.id,
^c22110235@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Peluang kerja saat ini semakin luas, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkarier secara global. Ketersediaan prospek pekerjaan yang signifikan dan faktor-faktor ekonomi yang mendesak telah mengubah migrasi menjadi pilihan yang layak bagi beberapa masyarakat. Kondisi tersebut merupakan hal yang perlu dicermati dalam sebuah struktur sosial di masyarakat. Berdasarkan data tahun 2022, Jawa Barat menempati peringkat ketiga dalam hal migrasi, dengan total 33.285 pekerja legal. Kabupaten Indramayu menjadi kontributor terbesar dengan jumlah 12.794 pekerja. *Jabar Migrant Service Center* (JMSC) adalah inovasi baru dari pemerintah Jawa Barat yang bertujuan untuk memfasilitasi informasi dan perlindungan bagi calon pekerja migran. Namun, panduan yang kurang memadai menyebabkan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan kurangnya pemanfaatan program ini karena kesadaran yang terbatas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa program JMSC belum mencapai hasil yang optimal, sehingga diperlukan pelatihan operasional yang berjenjang pada pengoperasiannya. Program JMSC diharapkan dapat memprioritaskan calon pekerja migran dan hak-hak mereka, dengan demikian dapat meningkatkan perlindungan dan keamanan kepada mereka sebagai masyarakat Jawa Barat.

Kata Kunci: Migran, JMSC, Pekerja

Jabar Migrant Service Center Program Strategy in Increasing The Workforce in West Java

Abstract

The current employment landscape offers expansive opportunities, granting individuals the chance to pursue global careers. The availability of significant job prospects and pressing economic factors have transformed migration into a viable option for certain communities. This phenomenon warrants careful consideration within the social structure of society. Based on 2022 data, West Java ranks third in migration, boasting a total of 33,285 legal workers. Indramayu Regency stands out as the largest contributor with 12,794 workers. The *Jabar Migrant Service Center* (JMSC), an innovative initiative by the West Java government, aims to facilitate information and protection for prospective migrant workers. However, inadequate guidance has led to a lack of understanding among the populace, resulting in limited utilization of the program due to low awareness. This research reveals that the JMSC program has not yet achieved optimal results, highlighting the need for progressive operational training. The JMSC program is expected to prioritize prospective migrant workers and their rights, thereby enhancing protection and security for the people of West Java.

Keywords: *Migrant, JMSC, Workers*

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

A. PENDAHULUAN

Inovasi perkembangan teknologi menjadi topik yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah. Peran teknologi yang sangat dibutuhkan di keseharian masyarakat, social, jual beli hingga permasalahan social yang terjadi di Indonesia. Dengan melihat peranan tersebut serta melihat urgensi pada perkembangan migrasi, pemerintahan di Jawa Barat membuat program untuk focus menangani permasalahan tersebut. Fenomena migrasi dapat terjadi karena salah satunya adalah rendahnya peluang pekerjaan di suatu daerah ataupun negara, rendahnya jumlah lapangan usaha dan minimnya peluang pekerjaan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari website open data jabar pada tahun 2022, jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 49.405.830 jiwa. Sedangkan jumlah penganggurannya yang ada di Jawa Barat sebanyak 8,31% jiwa, perhitungan ini diperoleh dari data badan pusat statistika Jawa Barat pada tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023.

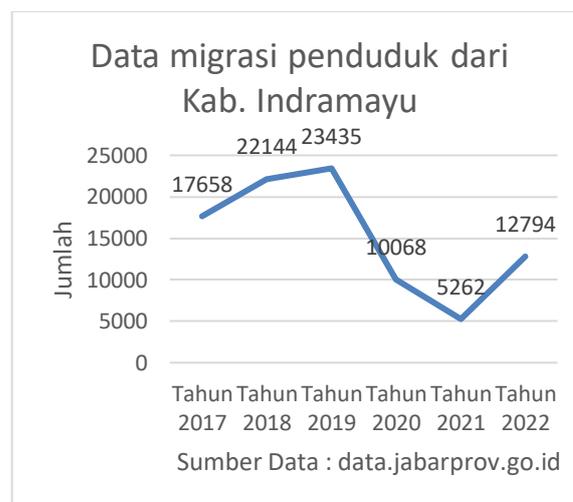
Jawa barat merupakan provinsi yang menjadi penyalur PMI (Pekerja Migran Indonesia) tertinggi urutan ke-3 dengan 33.285 jiwa PMI berdasarkan periode data dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia) yang ditarik pada bulan September tahun 2022.



Gambar 1.
Data Penempatan PMI Tahun 2022

Sumber Data: Balai Pelayan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dirilis pada September Tahun 2022.

Setelah melihat data grafik penempatan PMI Tahun 2022 di Indonesia, jumlah 33.285 jiwa yang ada di provinsi Jawa Barat diperoleh dari daerah-daerah tertentu dengan Kabupaten Indramayu menjadi penyalur migrasi tertinggi dengan jumlah sebanyak 12.794 pekerja migrasi di Jawa Barat berdasarkan laman website resmi Open Data Jabar.



Gambar 2.
Data Migrasi Penduduk Dari Kab. Indramayu

Dengan terus meningkatnya jumlah migrasi di Indonesia, maka pemerintah membentuk sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Hal ini dilakukan karena banyak dari masyarakat Indonesia yang mendaftar migrasi secara illegal yang dapat merugikan bagi negara maupun individu, serta untuk memberikan jaminan keamanan, hak-hak, dan perlindungan kepada PMI yang bekerja di luar negeri.

Jawa Barat membuat sebuah inovasi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan membuat Jabar Migran Service Center (JMSC). Program JMSC merupakan upaya Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jawa Barat untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Jawa Barat, serta menjamin keamanan dan kesejahteraan pekerja migran yang ada di provinsi Jawa Barat. JMSC berfokus kepada masyarakat yang memiliki

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

keinginan penuh untuk bermigrasi secara legal di bawah pengawasan negara. Pembentukan JMSC di Jawa Barat merupakan sebuah amanat dari Perda Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Jawa Barat.

B. PEMBAHASAN

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi, permintaan akan tenaga kerja semakin meningkat di Jawa Barat. Namun, banyaknya pengangguran dan minimnya kesempatan kerja menjadi masalah yang sering terjadi di provinsi ini. Selain itu, Provinsi Jawa Barat, sumber daya manusia yang potensial. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan strategi yang efektif dalam meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja di wilayah tersebut.

Pemerintah provinsi Jawa Barat telah merancang dan mengimplementasikan program Jabar Migrant Service Center (JMSC) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan tenaga kerja di daerah tersebut. JMSC adalah pusat pelayanan bagi tenaga kerja migran asal Jawa Barat yang berencana bekerja di luar negeri. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan pendampingan, perlindungan, dan peningkatan keterampilan kepada para calon tenaga kerja migran. Dengan demikian, JMSC berperan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Jawa Barat di pasar internasional.

Strategi program JMSC dalam meningkatkan tenaga kerja di Jawa Barat antara lain dengan memberikan pelatihan dan pendidikan vokasi agar tenaga kerja memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pasar global. Selain itu, program ini juga membantu mencari dan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Jawa Barat. Hal ini sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan landasan

hukum yang relevan dengan program Jabar Migrant Service Center (JMSC) dalam meningkatkan tenaga kerja di Jawa Barat. Undang- Undang ini disahkan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan program JMSC dalam upaya meningkatkan perlindungan, pendampingan, dan kualitas tenaga kerja migran asal Jawa Barat. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kasus pekerja migran di Indonesia, salah satunya (kasus). Dengan melihat fenomena yang terjadi mengenai pekerja migran dari Indonesia, pemerintah Jawa Barat menghadirkan inovasi untuk mewadahi para pekerja migran yang ada di Jawa Barat melalui program Jabar Migrant Service Center (JMSC).

Tenaga Kerja Migran dan Migrasi Internasional

Tenaga migran adalah istilah yang mengacu pada individu yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun antar negara, untuk bekerja atau mencari nafkah. Mereka melakukan migrasi dengan tujuan memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau kesempatan ekonomi yang lebih baik di tempat baru. Menurut International Labour Organization (ILO): "Tenaga migran tertuju pada individu yang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lainnya dengan maksud untuk bekerja".

Seseorang dapat bermigrasi menjadi tenaga kerja dengan berbagai alasan dan tujuan yang mendorong mereka untuk mencari peluang di negara atau di daerah lain, dengan harapan setelah mereka mendapatkan penempatan dan pekerjaan, para pekerja migran mampu meningkatkan kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena sering kali negara tujuan tempat mereka bekerja terdapat banyak sekali peluang pekerjaan dengan gaji

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

yang lebih baik. Masalah ekonomi menjadi permasalahan utama seseorang menjadi tenaga kerja migran.

Migrasi Internasional adalah perpindahan penduduk dengan tujuan tertentu dari suatu negara ke negara lain. Tetapi dalam melakukan migrasi internasional dibutuhkan modal finansial serta penyesuaian diri di negara tujuan termasuk bahasa, budaya serta adaptasi dengan sistem kerja baru (Massey dkk.,1993). Adapun beberapa teori mengapa seseorang bermigrasi salah satunya menurut (Piore 1979), migrasi internasional terjadi dikarenakan kebutuhan tenaga kerja di negara yang sudah berkembang dengan faktor pendorong di negara asal seperti upah rendah serta tidak adanya lowongan kerja. Dengan demikian seseorang dapat bermigrasi dikarenakan motivasi untuk bekerja di negara tujuan dikarenakan kebutuhan dan permintaan tenaga kerja disana.

Orang-orang yang memilih untuk menjadi tenaga kerja migran memiliki faktor pendorong yang kuat, dimana faktor ini sangat memengaruhi keputusan mereka yang akhirnya memilih untuk mencari pekerjaan di luar daerah maupun lintas negara. Ada 4 faktor pendorong seseorang melakukan migrasi menurut teori yang dikeluarkan oleh Everett S Lee, yaitu:

- Faktor asal seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, kompensasi yang kurang sesuai
- Faktor di area target seperti banyaknya lapangan pekerjaan dan profesi yang sesuai, tingginya upah yang ditawarkan
- Faktor penghambat seperti letak topografi daerah yang terpencil sehingga transportasi antar daerahpun sulit dijangkau
- Faktor alasan pribadi seperti adanya desakan dari keluarga, faktor ekonomi

Selain dari ke 4 faktor diatas, (Everett S Leem 2000) mengungkapkan faktor lain yang membuat seseorang memutuskan untuk melakukan migrasi lintas negara adalah:

- Peluang pekerjaan yang bagus dan sesuai

- Berpeluang mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik
- Lingkungan dari perusahaan yang memberikan rasa tenang dan aman
- Faktor penarikan dari seseorang yang dipercaya
- Letak strategis kota yang memiliki sarana prasarana lengkap.

Dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Everett S Lee, terdapat banyak faktor yang menjadi alasan seseorang melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan, namun dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling sering terjadi untuk mendorong seseorang bermigrasi adalah faktor ekonomi. Tanggungan keluarga yang semakin berat, tingginya tarif biaya hidup, pendapatan yang tidak seimbang dengan pengeluaran, merupakan faktor yang paling sering dijadikan alasan seseorang melakukan migrasi, hal ini berkaitan pula dengan tingginya tingkat pengangguran di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Indramayu. Kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai menjadikan alasan ini sebagai faktor seseorang tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari data yang terlampir pada Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

Jabar Migrant Service Center (JMSC)

Jabar Migrant Service Center (JMSC) merupakan program baru yang dikeluarkan pemerintah Jawa Barat untuk membantu para pekerja migran untuk bermigrasi. JMSC sendiri memiliki tujuan untuk menjadi perlindungan bagi pekerja migran di Jawa Barat, berdasarkan Perda Jabar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan PMI asal Daerah Jawa Barat, dan rupanya Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang melahirkan Perda perlindungan buruh migran serta melahirkan JMSC ebagai bentuk implentasi dari Perda tersebut. Dengan dikeluarkannya program JMSC ini, diharapkan bisa menjadi wadah bagi para pekerja migran yang berasal dari Jawa Barat yang ingin pergi bekerja keantar daerah, maupun lintas negara dapat terjamin keamanan dan hak-hak perlindungannya sebagai pekerja migran.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

JMSC telah menerapkan beberapa strategi yang efektif untuk meningkatkan tenaga kerja di Jawa Barat. Strategi dari prgram JMSC ini sendiri yaitu untuk

- a. Menyediakan Informasi dan Pendidikan kepada calon pekerja migran melalui pelatihan pra- pemberangkatan dan sesi konseling. Mereka juga memberikan informasi mengenai hak-hak pekerja migran, peraturan imigrasi, dan keselamatan kerja di negara tujuan.
- b. Menyediakan pembinaan dan Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan calon pekerja migran. Pelatihan yang diberikan mencakup keterampilan bahasa asing, keterampilan kerja, dan pengetahuan tentang budaya negara tujuan.
- c. Menyediakan pemberdayaan Ekonomi, JMSC berusaha membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait, termasuk sektor swasta dan organisasi non- pemerintah, untuk memberikan peluang ekonomi kepada pekerja migran yang kembali ke Jawa Barat. Mereka juga memberikan dukungan dalam mendirikan usaha mikro dan kecil untuk pekerja migran yang ingin mandiri secara ekonomi.
- d. Jaringan Kerjasama, JMSC menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kantor imigrasi, perwakilan pemerintah di negara tujuan, dan organisasi internasional terkait. Kerjasama ini bertujuan untuk memfasilitasi proses migrasi yang aman dan legal serta melindungi hak-hak pekerja migran.

Dari program JMSC ini diharapkan dapat membantu para pekerja migran untuk mendapatkan perlindungan diri di negara tujuan dan nantinya JMSC ini memiliki output dalam peningkatan daya saing penyalur pekerja migran terutama kepada provinsi lain. Tetapi mengingat program ini masih terbilang baru perlu adanya evaluasi untuk menunjang keberhasilan program JMSC dimasa yang akan datang. Terbukti dengan masih adanya pengaduan pada

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait para pekerja migran.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Fenomena migrasi adalah rendahnya peluang pekerjaan di suatu daerah ataupun negara, yang menyebabkan meningkatnya pengangguran yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-3 dengan 33.285 jiwa PMI berdasarkan periode data dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia) yang ditarik pada bulan September tahun 2022, dan Kab. Indramayu sebagai wilayah penyalur terbanyak dari provinsi Jawa Barat yaitu dengan jumlah sebanyak 12.794 pekerja migrasi. Dikarenakan jumlah pekerja migran terus meningkat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dengan adanya UU tersebut pemerintah Jabar membuat inovasi yaitu Program Jabar Migrant Service Center (JMSC) yang merupakan pusat pelayanan bagi tenaga kerja migran asal Jawa Barat yang berencana bekerja di luar negeri.

Terjadinya migrasi tenaga kerja di Jawa Barat khususnya Kab. Indramayu dikarenakan beberapa faktor, antara lain tanggungan keluarga yang semakin berat, tingginya tarif biaya hidup, pendapatan yang tidak seimbang dengan pengeluaran, merupakan faktor yang paling sering dijadikan alasan seseorang melakukan migrasi, hal ini berkaitan pula dengan tingginya tingkat pengangguran di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Indramayu.

JMSC bertujuan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Jawa Barat, serta menjamin keamanan dan kesejahteraan pekerja migran yang ada di provinsi Jawa Barat. JMSC berfokus kepada masyarakat yang memiliki keinginan penuh untuk bermigrasi secara legal di bawah pengawasan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, JMSC mempunyai strategi yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan vokasi agar tenaga kerja memiliki keahlian yang

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

dibutuhkan oleh pasar global, menyediakan Informasi dan Pendidikan kepada calon pekerja migran melalui pelatihan pra-pemberangkatan dan sesi konseling, menyediakan pemberdayaan Ekonomi, JMSC berusaha membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait, termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, untuk memberikan peluang ekonomi kepada pekerja migran yang kembali ke Jawa Barat, JMSC menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kantor imigrasi, perwakilan pemerintah di negara tujuan, dan organisasi internasional terkait.

REFERENSI

- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Anindita, N., Maasir, L. (2019). Work Life Balance (WLB) melalui Penerapan Aplikasi Kerja Berbasis IT pada Pegawai Wanita. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3 (1).
- Anwar, S., Trilestari, E. W., & Agustina, I. (2022). The Tourism Development Policy in Bandung Regency: A Study on Kampung Gamisâ€Soreang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 19 (1), 112 - 121. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.859>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (n.d.-a). Retrieved May 28, 2023, from <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/73/1/tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (n.d.-b). Retrieved May 28, 2023, from <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Fitriani, L., Kurniawan, L., Ahmad, F. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Desa dengan Pembuatan Klaster di Wilayah Kabupaten Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 23 (2), 151 - 178. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v23i2.202>
- Solimano, A. (2001). *International Migration and the Global Economic Order: An Overview*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2720>
- Spaan, E., & van Naerssen, T. (2018). Migration decision-making and migration industry in the Indonesia-Malaysia corridor. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(4). <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1315523>
- Erlando, A. (2014). Analisis Terhadap Migran Sirkuler Di Kota Surabaya. *Analisis Terhadap Migran Sirkuler Di Kota Surabaya*.
- Nasida, F. K., & Aloysius, S. (2021). Determinan Migrasi Berulang Mantan Pekerja Migran Indonesia. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.590>
- Noveria, M. (2017). MIGRASI BERULANG TENAGA KERJA MIGRAN INTERNASIONAL: KASUS PEKERJA MIGRAN ASAL DESA SUKOREJO WETAN, KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1). <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.255>
- Pradesa, H.A., Maasir, L., Priatna, R. (2021). Becoming More Burnout or Engaged with Job. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 131 - 135. DOI: 10.2991/assehr.k.210629.025.
- Pradesa, H.A., Agustina, I., Taufik, N.I., Mulyadi, D. (2021). Stakeholder Theory Perspective in the risk identification process in village government. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 5(1), 17-27. <https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.665>.
- Puspita, D., & Gusnita, C. (2019). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Kabupaten Indramayu Desa Juntinyuat. *Anomie*, 1(1).
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 6(2),

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- 108-118.
<https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.879>
- Rahman, A., Nugroho, A.B., Tindaon, S.S., Wijayanti, R. (2020). Advokasi Model Pemanfaatan E-commerce Untuk Peningkatan Daya Saing UMKM. *SeTIA MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 63 - 69.
- Rahmi, A., & Rudiarto, I. (2013). Karakteristik Migrasi dan Dampaknya terhadap Pengembangan Pedesaan Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA*, 9(4).
<https://doi.org/10.14710/pwk.v9i4.6672>
- Rizaty, M. A. (2023). BP2MI Catat 592 Pengaduan Pekerja Migran Indonesia. (n.d.). Retrieved May 28, 2023, from <https://dataindonesia.id/Sektor%20Riil/detail/april-2023-bp2mi-catat-592-pengaduan-pekerja-migran-indonesia>.
- Siti Marwiyah, S. H., Sedarmayanti, M. P., Fedianty Augustinah, M. M., Teni Listiani, M. M., Jubaedah, E., & Kushendar, D. H. (2023). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Di Era Digital. Deepublish.
- Wijayanti, R., Ravenska, N., & Nugroho, A. (2022). Business Model Innovation with Design Thinking Approach at Bumdes Pagerwangi. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021*.
<https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315259>.